

Analisis Transparansi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Bidang Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat

Iin Pramesti¹, Abdul Kadir², Suriyani BB³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo
email : iinpramesti017@gmail.com
Kendari,Indonesia

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam penelitian ini, pertanyaannya adalah bagaimana analisis transparansi program keluarga harapan (pkh) di bidang kesejahteraan sosial di kecamatan tiworo kepulauan kabupaten muna barat banyak faktor yang berdampak negative transparansi program keluarga harapan (pkh) di bidang kesejahteraan sosial di kecamatan tiworo kepulauan di kabupaten muna barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Informan pendataan pekerja sosial kabupaten muna barat, pendamping pkh beserta masyarakat penerima manfaat dari pkh. Dengan teknik wawancara dilakukan melalui teknik wawancara/interview. Menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada komunitas PKH di bidang kesejahteraan sosial di kecamatan tiworo kepulauan di kabupaten muna barat sudah cukup maksimal, misalnya dari Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat sudah berlangsung dengan optimal karena proses berjalannya sudah sesuai dengan tujuannya, faktor yang memberi dampak PKH seperti sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan sikap masyarakat sudah berlangsung sangat baik sehingga faktor yang menjadi penghambat, tidak terjadi di Kecamatan Tiworo Kepulauan kabupaten Muna Barat.

Kata kunci : Transparansi, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan sosial.

ABSTRACT

The main concern in this research is how to analyze the transparency of the Family Hope Program (PKH) in the field of social welfare in the Tiworo Islands sub-district, West Muna Muna Regency, and the factors that influence the transparency of the Family Hope Program (PKH) in the social welfare sector in the Tiworo Islands District in the Regency. West Muna. The research method used was a qualitative descriptive analysis method with information from the head of the West Muna district social service, Pkh assistants, and the community who received benefits from Pkh. Data collection was carried out through interview techniques. The results of this research show that the implementation of the transparency of the Family Hope Program (PKH) in the field of social welfare in the Tiworo Islands sub-district in West Muna Regency has been quite optimal, for example, the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Tiworo Islands sub-district, West Muna Regency has been running optimally because The progress of the process is by its objectives, the factors inhibiting PKH such as socialization, community participation and community attitudes have gone very well so that the factors that become obstacles do not occur in Tiworo Islands District, West Muna Regency.

Keywords: Transparency Analysis, Family Hope Program, social welfare.

PENDAHULUAN

Melaksanakan program di Indonesia berdasarkan deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1945, penerbitan keputusan presiden nomor 40 tahun 2004 tentang Dewan Sosial Nasional, keputusan presiden Nomor 11 tahun 2009 tentang Undang-undang Kontrak Sosial, dan keputusan presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang kemiskinan.

Kemiskinan sendiri di Negara berkembang merupakan persoalan yang sangat serius. Keberhasilan penerapan standar nasional kemiskinan suatu Negara atau wilayah yang di maksud. Indonesia adalah Negara yang sangat sederhana, dan kemiskinan adalah masalah yang perlu di atasi. (Sartika et al.2016).

Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat Indonesia tidak bisa menerima pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai layanan kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya akses terhadap pelayanan publik, berkurangnya kesempatan kerja, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan keluarga, meningkatnya migrasi ke kota dan hal-hal yang lebih buruk lagi, kemiskinan menyebabkan jutaan orang memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Oleh dari itu, adanya Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai potensi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. (Christiano,2013).

Pemerintah, sebagai otoritas tertinggi, menggunakan berbagai cara untuk mendorong kesetaraan gender, yang paling menonjol adalah melalui kebijakan-kebijakan yang pro-miskin yang diterapkan sebagai program kesejahteraan kelompok. PKH singkatan dari bantuan tunai bersyarat (bantuan bersyarat) untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengembangan sistem perlindungan sosial yang menciptakan dan mendukung rumah tangga berpendapatan rendah berupa perolehan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar yang dipadukan dengan program yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kendala utama keberhasilan program ini adalah tingginya jumlah pasien miskin dan rendahnya kualitas SDM. (Kemensos RI.2012).

Inisiatif ‘keluarga harapan’ pemerintah Indonesia diluncurkan bersamaan dengan peringatan Hut dasar tahun 1945. Deklarasi Hak Asasi Manusia Unesco No.40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan sosial nasional Deklarasi hak asasi manusia Unesco No.11 tahun 2009 tentang pedoman pembangunan sosial No.15 tahun 2010 tentang pengasuh Anak.

Bantuan dana PKH dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan penduduk miskin dalam bidang pendidikan anak, kesehatan anak bagi ibu dan ayah, serta lansia. PKH juga berupaya menghilangkan terjadinya kemiskinan ditengah masyarakat sosial dan mengubah

persepsi kemiskinan. PKH akan memberikan manfaat pendek dan panjang. Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga akan memberikan dampak pendapatan kepada RTSM untuk jangka pendek PKH. Untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang dengan meningkatkan standar gizi pendidikan dan perawatan anak sepanjang tahun-tahun awal kehidupan anak, serta biaya keseluruhan membesarkan anak miskin (Saladin, 2013).

Sulawesi Tenggara dalam program keluarga harapan disebutkan bahwa wilayah ini memiliki jumlah penduduk miskin tersebut relative mendekati data resmi hasil survey dari departemen Statistik, menunjukkan bahwa banyak penduduk miskin di wilayah ini 11,27% persen atau naik 0,10 persen dari total Maret 2022, Namun jika dibandingkan dengan angka kemiskinan September 2021, persentasenya meningkat sebesar 0,47 persen, menurut data statistik. Kondisi seperti ini membuat banyak kerabat miskin tidak dapat mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan secara tepat waktu. (BPS Sultra, 2022).

Mulai tahun 2015, 11 kabupaten kota yakni Program Keluarga Harapan (PKH) diprovinsi Sulawesi Tenggara ini sebanyak 30.055 Kepala Keluarga (KK) miskin, dengan rincian Kabupaten Muna Barat 4.600 keluarga, Kabupaten Buton sebanyak 4.420 keluarga, Kolaka Utara 1.308 keluarga, Konawe Selatan sebanyak 2.717 keluarga dan Konawe Utara sebanyak 366 keluarga, Wakatobi sebanyak 2.054 keluarga, Kolaka sebanyak 4.568 keluarga, Konawe 4.330 keluarga, Muna sebanyak 4.643 keluarga, Kota Kendari sebanyak 2.187 keluarga dan Kota Bau-bau 2.064 keluarga (Dinas Sosial Sulawesi Tenggara, 2019).

Kabupaten Muna Barat pada awal adanya PKH pada tahun 2014 hingga tahun 2023 ini, semua desa dan kecamatan di Kabupaten Muna Barat memperoleh dana dari PKH. Namun, disetiap kecamatan, tidak semua desa menerima PKH, hanya desa-desa yang memenuhi persyaratan, yaitu miskin, yang berhak menerima pembayaran PKH. Untuk tahun 2023 ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra) mencapai 4.600 orang Kepala Keluarga (KK). Lalu bertambah sekitar 1.500 orang (Dinas Sosial Kabupaten Muna Barat, 2023).

Pelaksanaan Program Keluarga harapan di Kabupten Muna Barat diduga belum transparan dan syarat situasi dimana sejumlah besar rumah tangga yang sangat miskin tidak mempunyai akses terhadap dana tersebut. Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari tim manajemen public, yang memungkinkan mereka mengembangkan akses terhadap proses tersebut sehingga informasi dibagikan dan diambil dengan cara yang adil dan tidak memihak. Dengan cara ini, dalam proses transparansi, informasi tidak diberikan begitu saja oleh pengelola informasi public, masyarakat umum mempunyai hak untuk mengakses informasi

yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, dalam dalam proses pelayanan pemantauan media sosial, informasi akurat dan akuntabel yang diberikan masyarakat mengenai resiko media sosial sangat penting untuk mencegah kegelisahan dan perilaku buruk yang timbul karena asumsi bahwa resiko yang di ungkapkan adalah tanggung jawab masyarakat miskin.

Tiworo kepulauan adalah salah satu terakhir di kabupaten muna barat. tiworo kepulauan adalah kecamatan yang ada mendapat bantuan PKH. Permasalahan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan program harapan kelompok Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat yaitu adanya pemotongan dana dan ketidakmerataan jumlah dana yang di berikan oleh petugas pengaduan umum di masyarakat transparansi pengelolaan PKH di Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor, seperti re4ndahnya sosialisasi dari unit pelaksana program (UPPKH) keluarga harapan. Intinya transfer dana PKH ke orang tua tidak sesuai untuk membiayai pendidikan anak, ada kendala dana PKH yang ditransfer ke RTSM untuk hal-hal yang tidak tercakup dalam program PKH sebagai penerima manfaat PKH, tidak lengkapnya dokumen pendukung tentang PKH, ketidakjelasan proses pendataan calon penerima PKH sendiri menyatakan bahwa RTSM akan sangat penting bagi kesehatan dan pendidikan.

Melalui kutipan di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan cara pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Kabupaten Muna Barat yaitu di Kecamatan Tikep dalam hal transparansi pengelolaan PKH. Faktanya, sosialisasi dari unit tindakan Pogram Keluarga Harapan, mengenai utang PKH, tidak terbayarnya pinjaman, dan adanya penagihan utang oleh pekerja PKH kepada masyarakat. Salah satu tujuan yang sulit dicapai adalah untuk memahami transparansi pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat; Untuk memahami faktor penghambatnya transparansi pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat. Subyek penelitian mencakup ketua kelompok sosial atau kepala dinas sosial, Kepala Kecamatan Tikep, Pendamping Program Keluarga Harapan, keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, dan warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penambahan informasi, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang transparansi pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tikep, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang akurat tentang temuan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transparansi Dalam Melaksanakan Program Keluarga Harapan Berbasis Masyarakat Tiworo Kepulauan

Ditinjau dari tingkat kemiskinan dan pertumbuhan kebijakn sosial, jaminan pemerintah Indonesia telah melaksanakan inisatif sejak tahun 2007 menyelesaikan program KAP untuk anggota keluarga. Program ini telah diterapkan dan cukup berhasil di beberapa neagara yang terkenal dengan bantuan tunai bersyarat atau tunai yang ramah syariah. PKH bukanlah hasil dari subsidi yang ditawarkan untuk membantu rumah tangga sangat miskin mempertahankan taraf hidup mereka selama pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM mandiri, melainkan sebagai sarana untuk membangun jaringan pengaman sosial bagi kelompok kronis.

Program ada beberapa metode penyelenggaraan PKH di Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi Mengenai Kebijakan

Dihampir setiap aspek kehidupan manusia, dimulai dari aktivitas menghidupi diri dan pengabdian kepada masyarakat hingga dinas militer, informasi sangat penting bagi setiap individu dalam perkembangan pribadi dan sosialnya. Seperti kita ketahui bersama, diantara sekian abnyak pelayanan yang diberikan oleh masyarakat umum, yang paling menonjol, salah satunya adalah program-program yang diadakan oleh pemerintah.

Program bantuan kesejahteraan sosial yang disediakan oleh pemerintah sangatlah banyak hanya saja kurangnya akses untuk mendapatkannya, untuk itu dibutuhkan keahlian yang cekatan dalam mencari informasi terkait dengan program kesejahteraan sosial. Sekarang masyarakat diberikan kemudahan dalam memperoleh informasi perjalanan prosedur dan baiaya yang diperlukan yaitu cara memanfaatkan teknologi informasi dahn komunikasi (TIK).

Akses informasi yang diperoleh oleh masyarakat Kecamatan Tiworo Kepulauan yaitu melalui sosialisasi yang diadakan oleh pendamping yang telah ditentukan oleh Badan Statistik pada tanggal 21 November 2023. Sosialisasi yang diadakan yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada Masyarakat Kecamatan Tiworo Kepulauan terkait program keluarga harapan (PKH) berupa (1) apa pengertian dari PKH itu sendiri, (2) tujuan PKH, (3) persyaratan untuk memperoleh PKH. Selain itu pendamping PKH memberikan pengetahuan terkait pentingnya pendidikan serta manfaat pendidikan bagi penerima PKH.

Terkait dengan hal tersebut berikut penuturan seorang informan terkait dengan sosialisasi Program Keluarga Harapan:

“Sosialisasi yang diadakan pada tanggal 21 november 2023 mengenai PKH merupakan sosialisasi yang sangat baik, karena dalam penjelasan mengenai program PKH sudah sangat jelas, hanya saja dalam pelaksanaan sosialisasi kurangnya sarana dan prasarana, tempatnya sangat kecil, sehingga kami terkesan tidak fokus dalam mendengarkan pematari. Sosialisasi ini selalu didampingi oleh ibu pendamping PKH, sehingga kami selalu diberikan arahan terkait apa saja yang perlu kita siapkan untuk mendapatkan PKH ini”. (Wawancara dengan Ami salah satu warga Kecamatan Tiworo Kepulauan).

Sebagaimana tertera pada keterangan diatas, Program Keluarga Harapan (PKH), di Kecamatan Tiworo Kepulauan terlihat bahwa kemudahan informasi mengenai kegiatan masyarakat baik yang tergabung dalam kelompok miskin maupun sangat miskin diberikan oleh pendataan dan sosialisasi PKH kepada masyarakat. tentang mereka bahwa mereka telah masuk kedalam kategori anggota masyarakat sangat miskin.

Gambar 1. Program Sosialisai kepada Keluarga Harapan di Kecamatan Tiworo Kepulauan



Sumber : Penulis

Namun berdasarkan hasil kajian jangka panjang para pengamat dilapangan ditetapkan bahwa informasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) keluarga ditujukan khusus untuk keluarga yang memiliki anak sangat kecil dan RTSM terkesan sangat lamban dalam mengakses informasi, dikarenakan pada umumnya masyarakat di Kecamatan Tiworo Kepulauan

ini masih sangat kurang dalam menggunakan teknologi, Oleh karena itu, terkadang masyarakat umum belum sepenuhnya memahami dasar-dasar Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka belum mengetahui mengenai PKH itu sendiri sehingga mereka menganggap bahwa sosialisasi yang diadakan tidak memiliki kepentingan sama sekali sehingga informasi yang mereka terima tidak disebarluaskan.

Dalam hal penyebaran informasi oleh pihak aparat public (aparat kelurahan) Masyarakat di Kecamatan Tiworo Kepulauan bersifat terbatas, dikarenakan kurangnya perhatian dari masyarakat sehingga dalam satu desa maupun kecamatan Tiworo Kepulauan tak semua menerima informasi yang disampaikan oleh aparatur public (pegawai kelurahan) terkait Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Tahap Penyeleksian

Program Keluarga Harapan didasarkan pada peraturan PKH. Dilakukan sebagai bagian dari implementasi Undang-undang jaminan sosial No.40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional dan undang-undang jaminan sosial No.11 Tahun 2009 tentang jaminan sosial, undang-undang No.3 tahun 2010 tentang penetapan tarif penyelesaian program oleh masyarakat umum dan Perpres No.15 tahun 2010 tentang angka kemiskinan. PKH merupakan bentuk keadilan sosial yang unik berdasarkan amandemen-amandemen keempat yang disahkan pada tahun 2004.

Proses penyeleksian dilakukan agar masyarakat yang betul-betul berada dikondisi RTSM lah yang menerima PKH ini. Proses penyeleksian ini dilakukan oleh pengolahan Data Badan Pusat Statistik (BPS), aparat kecamatan dan pendamping PKH yang ditugaskan di Kecamatan Tiworo Kepulauan. Setelah sosialisasi dilakukan maka semua Kepulauan akan melakukan penyeleksian yang ketat dengan segala pertimbangan yang ada, karena terkadang di daerah lain ada warga RTSM yang seharusnya menerima PKH ini, tetapi ternyata dia tidak menerimanya. Oleh karena itu proses penyeleksian dilakukan agar masyarakat RTSM yang betul-betul menerimanya.

Gambar 2. Survey yang dilakukan bersama pendamping PKH Ibu Mutmainah, SKM yang ditugaskan oleh badan pusat statistic



Sumber : Penulis

Gambar 3. Wawancara terkait hasil yang dilakukan oleh Bapak Drs. La Ode Tibolo.MM selaku kepala dinas sosial



Sumber : Penulis

Hasil wawancara dengan Tokoh Sosial Kabupaten Muna Barat itu yaitu Bapak Drs La Ode Tibolo,MM:

“Gambaran kesiapan dan aksesibilitas dokumen terkait dengan bantuan sebuah Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Tiworo Kepulauan telah dilaksanakan, ini berkaitan dengan dokumen penerima.PKH itu dia sumber datanya ada namanya BDT kecamatan artinya basis data terpadu yang dikelola sendiri oleh pihak kecamatan yang kemudian BDT tersebut diusulkan oleh kecamatan dan direkomendasikan oleh Dnas Sosial supaya dia masuk kepada data kabupaten (BDT Kabupaten) terkait penanganan fakir miskin,kemudian data itu bersama-sama oleh Dinas Sosial kemudian Desa,Kecamatan,dan BPS Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi pada tahun berjalan artinya pada tahun 2023 ini,kemudian semua data BDT Kecamatan yang dirangkum dalam BDT Kabupaten itu dikirimkan ke namanya TNP2K (Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan) oleh TNP2K dilakukan prosedur-prosedur perengkingan tentu ini melibatkan pihak pusat dalam hal ini PUSDATIM (Pusat

Data Informasi) kesos (Kesejahteraan Sosial) yang ada di bawah naungan Kementerian Sosial, kemudian PUSDATIM Kesos melakukan validasi, verifikasi yang dilakukan kepada seluruh usulan Kabupaten Kota, kemudian disesuaikan dengan kuota penerimaan atau penambahan atau kuota bakal penerima di setiap daerah Kabupaten kota itu sendiri, setelah itu kemudian data inilah yang diteruskan kepada pendamping sosial yang ditugaskan pada wilayahnya kerja masing-masing, kemudian dilakukan pertemuan awal menyangkut dengan terbitnya nama-nama mereka sebagai calon penerima PKH, jadi di awal pertemuan diberikan surat yang diundang di kecamatan kemudian diberikan sosialisasi terkait PKH, apa itu PKH kewajiban mereka apa setelah mereka menerima PKH dll, setelah itu kemudian disepakati oleh kedua belah pihak masyarakat dan kecamatan, kemudian dilakukan penandatanganan dalam surat pertemuan awal apakah mereka bersedia menjadi penerima peserta PKH, dan memperoleh haknya” (wawancara kabid dinas sosial kabupaten muna barat). (Drs La Ode Tibolo, MM, 2023)

Program dikenal dengan nama PKH program kesejahteraan yang langsung diawasi oleh pengolahan Data Badan Pusat Statistik (BPS). Survei yang dilakukan diawasi langsung oleh pihak BPS dan di damping oleh pendamping PKH Kecamatan Tiworo Kepulauan. Survey yang dilakukan yaitu dengan mengecek kelengkapan data yang telah di berikan, setelah itu survey yang dilakukan melihat lokasi rumah yang menjadi calon penerima PKH.

Selain itu, perlu adanya pencatatan tertulis atas setiap keputusan yang diambil guna menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat atas informasi yang terdapat dalam catatan tertulis tersebut, yang sebagian besar berkaitan dengan penyaluran bantuan tunai anggota masyarakat yang menjadi penerima, sangat dan sangat miskin.

3. Tahap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan Program PKH di Masyarakat Muna Barat sudah ada Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tiworo Kepulauan sejak tahun 2014, Program PKH di Kecamatan Tiworo Kepulauan telah berjalan lancar hampir sepuluh tahun, dan masuk dalam kategori berikut:

- 1) Wanita hamil/nifas/anak balita
- 2) Seorang anak yang terdaftar disekolah atau sebelum memulai pendidikan formal (usia 7-12 tahun)
- 3) sekolah SD/SMP/Paket A/SDLB (Usia 7-12 tahun).
- 4) Siswa SLTP/Mts/Paket B/SMLB (Usia 12 s/d 15 tahun)
- 5) Anak berumur antara 15 dan 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
- 6) serta orang tua

Berdasarkan kategori diatas maka penerima PKH di Kecamatan Tiworo Kepulauan sudah melengkapi kategori diatas. Akan tetapi penerima PKH pada tahun 2023 berdasarkan

data pada saat sosialisasi tanggal 21 november 2023 lebih banyak ibu hamil anak pra sekolah (usia 5-7 tahun), anak SLTP (usia 12 s/d 15 tahun) dan anak usia 15 sampai dengan 18 tahun serta Lansia. Tetapi untuk penerima PKH kategori anak yang bersekolah atau , memulai pendidikan dasar usia (7-12 tahun) hanya beberapa saja. Dalam penelitian ini difokuskan pada 2 RTSM saja. RTSM yang diteliti memiliki 2 orang anak pertama SMA dan kedua orang tua lansia. Adapun wawancara dengan penerima PKH Ibu Wa Ode Jhaya selaku orang tua penerima PKH dibidang kesejahteraan sosial:

“Kemudahan aksesibilitas dokumen yang disalurkan dari Dinas Sosial maupun pihak pendamping PKH dari Kecamatan Tikep saya sudah menerimanya, sebagai penerima PKH saya menerima kejelasan informasi mengenai PKH yaitu berupa kelengkapan data bantuan PK di kecamatan tikep kabupaten muna barat, keterbukaan proses selalu diperlihatkan dalam penyelenggaraan PKH ini baik dari pihak Dinas Sosial maupun pendamping PKH, manfaat yang saya dapatkan dari program PKH ini adalah dapat membantu anak-anak RTSM agar bisa bersekolah supaya SDM bisa meningkat. Selama mendapatkan program PKH ini tidak ada kendala yang saya dapatkan . ” (Wa Ode Jhaya, 2023)

Adapun wawancara dengan penerima PKH lansia Ibu Wa Ode Ole dibidang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

“Kemudahan aksesibilitas dokumen yang disalurkan dari Dinas Sosial maupun pihak pendamping PKH dari Kecamatan Tikep saya sudah menerimanya, sebagai penerima PKH saya menerima kejelasan informasi mengenai PKH yaitu berupa kelengkapan data bantuan PK di kecamatan tikep kabupaten muna barat, keterbukaan proses selalu diperlihatkan dalam penyelenggaraan PKH ini baik dari pihak Dinas Sosial maupun pendamping PKH, manfaat yang saya dapatkan dari program PKH ini adalah dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan kami lansia walaupun tidak sepenuhnya namun saya sangat bersyukur atas adanya PKH ini. Selama mendapatkan program PKH ini tidak ada kendala yang saya dapatkan” (Wa Ode Ole, 2023)

Bantuan Ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) yang dikenal sebagai pengurus keluarga diberi PKH tunai, segera paham mtunai PKH. Uang diberikan secara lebih efisien untuk meningkatkan standar siswa, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jika tidak ada perempuan yang lebih tua dalam kelompok, maka ketua kelompok atau orang yang dihormati sebagai sarana peserta PKH KSM disediakan Kartu peserta PKH. Kepala keluarga di kantor pos terdekat dapat mengambil uang bantuan dengan menyerahkan kartu peserta PKH dan tidak dapat terwakilkan.

Tabel 2. Indeks Konstituen PKH 2023

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan
1	Bantuan Tetap	500.000/Tahun
2	Bumil/Balita/Apras(Anak Pra Sekolah)	1.200.000
3	SD	450.000
4	SMP	750.000
5	SMA	1.000.000
6	Disabilitas Berat	3.100.000
7	Lansia	1.900.000

Sumber: Data Sekunder (2023)

4. Hasil Yang dicapai

Berdasarkan tahap yang telah dilalui maka hasil yang dapat dipahami dari Program Keluarga Harapan(PKH) yaitu proses yang berjalan bersifat transparansi karena memenuhi kategori yang diinginkan. Walaupun masih ada kendala pada tahap pertama yaitu akses informasi dikarenakan masyarakat di Kecamatan Tikep ini masih kurang mengerti mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK).

Pada tahap penyeleksian juga bersifat terbuka artinya survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statisti(BPS) sangat terbuka kepada masyarakat sehingga proses yang berjalan dapat diketahui oleh masyarakat Kecamatan Tikep dan bersifat transparansi.Selanjutnya tahap proses pelaksanaan PKH ini berlangsung sangat baik,Karena Sosialisasi yang diadakan pada tanggal 21 november 2023 dihadiri oleh penerima sosialisasi program keluarga harapan PKH dengan cara ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat luas menerima Program Keluarga Harapan(PKH) dapat mengetahui berita terbaru mengenai aturan-aturan dan syarat-syarat yang harus mereka penuhi.

Adapun hasil wawancara dengan kepala Dinas Sosial kabupaten Muna Barat sebagai berikut:

“Transparansi terkait akses dokumen saya kira sudah jelas ya.sudah bersifat transparan karena seluruh dokumen terkait dengan kepesertaan mereka dalam PKH ini diberikan kepada penerima PKH.Pendamping tidak pernah memegang dokumen itu,pendamping memegang dokumen itu ketika ada permintaan data insidensi,data yang secara tiba-tiba diminta oleh Kementrian,kemudian data itu tidak ada disekretariat atau data informasi kabupaten kot,maka itu kita minta langsung kepada yang bersangkutan,kita suruh foto copy,kemudian salinan asli kita jadikan patokan untuk mengantri data-data mereka bahkan kita meminta kartu pelajar anaknya,BPJS anaknya,kemudian informasi terkait dengan aktru keluarga(KK),KTP dan sebagainya.Karena dalam penginputan dia meminta Nik orang tua sampe anak,meminta nomor BPJS orang tua sampe anak,kemudian meminta data NISN bagi yang punya komponen pendidikan bahkan kami bekerja sama dengan beberapa instansi yang lain,seperti DinaS Pendidikan Dan Dinas Kesehatan untuk kemudian mencoba mencari kejujuran penerima PKH karena biasanya mereka melaporkan anaknya bahwa anaka tersebut sekolah,ternyata pada kenyataannya

tidak hanya untuk mendapatkan masuk dalam kategori pendidikan, kita juga selalu melakukan pengawasan". (Kadis Dinsos, 2023)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintahan di Kecamatan Tikep sangat terbuka terkait dengan bantuan-bantuan kesejahteraan kebijakan sosial yang dilaksanakan oleh program penjangkauan masyarakat PKH pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH) yang berlangsung di Kecamatan Tikep bersifat transparansi karena indikator yang diinginkan terpenuhi. Adapun indikator yang harus dipenuhi oleh Kecamatan Tikep yaitu:

- a. memberikan informasi yang jelas tentang nilai tukar, metode eksekusi, dan tingkat kemunduran bursa.
- b. Adanya musyawarah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- c. Rincian proses pengajuan pinjaman
- d. Rincian informasi mengenai dokumen pinjaman PKH.

Hal ini sejalan dengan pernyataan pendamping PKH di kecamatan Tikep yang ditugaskan mengawasi PKH yang berlangsung

B. Faktor-faktor yang Dapat Menghambat Pelaksanaan Program Dukungan Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tiworo Kepulauan

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu dalam pelaksanaan sosialisasi. Dalam implementasi ini akan menjelaskan berbagai persoalan, termasuk programnya mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tiworo Kepulauan ini. Implementer akan menjelaskan latar belakang PKH, tujuan PKH, persyaratan untuk mendapatkan PKH ini.

Sosialisasi yang diadakan pada tanggal 21 november 2023 ini berlangsung dengan baik, karena seluruh masyarakat yang mendapatkan PKH hadir mengikuti sosialisasi ini. Program PKH adalah program berkelanjutan artinya program ini selalu dilaksanakan setiap tahunnya, oleh karena itu banyak persyaratan-persyaratan yang diperbaharui. Untuk itu mengapa para penerima PKH ini harus selalu mengikuti sosialisasi yaitu agar mereka selalu mengetahui tentang perkembangan PKH ini.

Berdasarkan hasil pendamping PKH di masyarakat setempat Tiworo Kepulauan diketahui bahwa sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 november 2023 yang melibatkan berbagai pihak khususnya para pendamping PKH yang ditugaskan oleh bagian Statistik (BPS) berjalan dengan baik. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pendamping PKH di kecamatan tiworo kepulauan sebagai berikut:

“Dalam proses pelaksanaan PKH ini berjalan dan hampir sesuai rencana tetapi pentingnya sosialisasi kepada KPM PKH untuk tidak ketergantungan dengan bantuan, dan memanfaatkan bantuan PKH untuk keperluan sekolah, pengobatan, makanan bergizi, dan modal usaha, semua disesuaikan dengan kondisi KPM masing-masing, agar kedepannya bisa sejahtera dan mandiri. hal lain yang menjadi masalah adalah beberapa data masih membutuhkan waktu yang lama seperti perbaikan data di bank, Banyaknya Nik KPM tidak aktif di dukcapil menyebabkan data tidak sinkron dan bantuan PKH tidak kelua, banyak data anak KPM tidak sinkron dengan data dapodik, data KPM tidak sinkron dengan data Bank Himbara keterangan S1 di DTKS. Pendamping atau memfasilitasi KPM PKH mengaktifkan Nik di Capil, Penambahan ART di DTKS, komunikasi atau sosialisasi dengan pihak sekolah tentang mensinkron data anak KPM dengan Kartu Keluarga di Dapodik” (Pendamping PKH, 2023)

Dari hasil wawancara di atas faktor sosialisasi itu sudah baik karena dengan sosialisasi masyarakat di Kecamatan Tiworo Kepulauan mengerti dan paham dengan sosialisasi program PKH itu sendiri.

2. Partisipasi Masyarakat

Dalam proses sosialisasi PKH partisipasi masyarakat sangatlah penting karena PKH merupakan Program Kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat sering dianggap sebagai komponen penting dalam inisiatif public. Menilik partisipasi masyarakat sebagai proses fundamental pembangunan masyarakat, maka terlihat bahwa pengembangan wacana partisipatif dalam pembangunan masyarakat akan berkaitan dengan wacana masyarakat.

Sosialisasi yang diadakan pada tanggal 21 november 2023 melibatkan partisipasi masyarakat yang baik, karena sosialisasi yang diadakan di Kecamatan Tikep pada tanggal 21 november 2023 di hadiri oleh seluruh masyarakat penerima PKH.

Berkat hal masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam program keluarga harapan PKH dan berbagi nilai-nilai keyakinan, dan kepedulian yang sama pelaksanaan PKH adalah positif yang diberikan masyarakat di Kecamatan Tiworo Kepulauan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat kecamatan tiworo kepulauan aktif mengikuti setiap kegiatan pertemuan bulanan antara masyarakat dengan para pendamping, terbukti dengan adanya absensi peserta pada saat sosialisasi.
- 2) Masyarakat juga secara aktif berpartisipasi dalam memberikan bimbingan atau nasihat dalam upaya khusus ini. Apabila masyarakat tertentu menerima PKH dan mengalami kendala selama mengikuti program harapan, maka masyarakat atau peserta PKH lainnya akan memberikan dukungan berupa solusi terhadap permasalahan yang di maksud.
- 3) Masyarakat telah mengakui kewajibannya sebagai peserta program keluarga harapan PKH terkait pendidikan. Hal ini terlihat pada penduduk yang memiliki sekelompok teman yang

terdiri dari anda secara pribadi orang tua lanjut usia yang rutin memeriksakan kesehatannya. Namun hal ini terkait dengan sistem pendidikan. Umum yang memiliki seorang anak berusia antara 6 dan 15 tahun yang terdaftar di SD dan SMP dan mengikuti minimal 85% ujian akhir sekolah.

3. Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat terhadap hasil dari program ini baik karena masyarakat yang tinggal dilingkungan tingkat memiliki pemahaman yang baik tentang sifat program PKH dan dapat dengan mudah memperoleh informasi melalui media sosial, juga ada diadakan pada tanggal 21 november 2023 yang diadakan oleh pihak desa yang diutus oleh kecamatan dan juga pendamping PKH yang diutus oleh Badan Pusat Statistik(BPS).

Masyarakat di Kecamatan Tiworo merasa sedih dan tertekan setiap aktivitas itu dilakukan program keluarga harapan(PKH). Hal ini disebabkan oleh keikutsertaan masyarakat penerima PKH dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan yang berkaitan dengan keadilan sosial dan pendidikan kesehatan bagi anak-anak dan orang lanjut usia. Masyarakat yang tinggal dikecamatan tikep merasa puas dengan pelaksanaan PKH diKecamatannya karena penduduk setempat merasakan dampak yang stabil dan positif dari program ini dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tikep.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat provinsi Sulawesi Tenggara telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun sejak dimulai pada tahun 2014. Program ini menunjukkan tingkat transparansi yang baik, dengan memenuhi indikator yang diinginkan seperti penyediaan informasi yang jelas, kehadiran musyawarah masyarakat, pembaruan proses pengelolaan, dan pemutakhiran informasi terkait PKH. Filosofi pendamping PKH dan peran aparat kecamatan dalam pengawasan PKH sejalan dengan implementasi yang lancar. Implementasi PKH di Kecamatan Tiworo Kepulauan berjalan dengan efisien dan optimal, terlihat dari penurunan jumlah masyarakat miskin di wilayah tersebut dan proses pelaksanaan yang berjalan baik tanpa hambatan signifikan seperti sosialisasi yang baik, partisipasi masyarakat yang aktif, dan sikap yang mendukung dari masyarakat.

REFERENSI

- Adi, Rifki Nugroho, 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian dengan Sistem Pre-Order secara Online (Studi Kasus pada Online Shop Choper Jersey). Skripsi UNDIP.
- Agus Dwiyanto. 2016. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ahmad Hidayat dan Chandra Kurniawan. 2016. Pengaruh Konsep Diri dan Kepercayaan Diri terhadap Perilaku Konsumtif Pembelian Gadget pada Mahasiswa Fakultas Hukum dia Non Reguler Universitas Islam Riau. ISSN 1907-3305 Volume 10 no 1.
- Amin Widjaja Tunggal. 2013. Pokok-pokok Auditing dan Jasa Asurans. Jakarta: Harvindo.
- Andriani, Marleni dan Ariesta 2013, pemanfaatan bantuan Dana program keluarga harapan (pkh) bagi masyarakat penerima di kampung lubuk, Sarik Nagadi kambang utara kecamatan lengayang kabupaten pesisir selatan. Jurnal. Program studi pendidikan sosiologi STKIP PGRI Kendari.
- Anggraini, D., & Nasution, S. H. 2013. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. I No. 3, 105-116.
- Ayu andira, Burhanudin, Rita kalalalinggi 2018. Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Samarinda Utara. Jurnal ilmu pemerintahan. ISSN 2477-2631 vol 6 (4) 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka 2021. Makassar: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.
- Christian, A., & Dharmayanti, D. (2013). Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Customer Satisfaction Dan Customer Loyalty the Light Cup Di Surabaya Town Square. Jurnal Manajemen Pemasaran Petra, 1(2), 1–13.
- Djaja, Mustofa, 2014, Transparansi pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dalimunthe, N., & Sartika, D. (2016). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Inlis Lite Menggunakan Metode Libqual (Studi Kasus : Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru). Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri, 13(2), 211–217.
- Haryatmoko. 2011. Etika Publik. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kemensos RI 2013, Pedoman umum keluarga harapan (PKH). Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- Krina, Loina Lalolo 2013. Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jakarta: sekretariat (good publik governance) badan perencanaan pembangunan nasional.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2016). Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. <http://pkh-jogjaistimewa.com>.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2012). Permensos No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia. Jakarta : Sekretariat Kemensos RI.
- Maleong, Lexy j.2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muhammad 2020 , Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan binongko kabupaten wakatobi journal publicuho, ISSN:2621-1351.
- Mulyaningsih, R. 2013. Kandungan Unsur Fedan Zn dalam Bahan Pangan Pertanian dan Perikanan dengan Metode k0-AANI. Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir – BATAN, Tangerang.
- Pohan, Imbalo S. 2013. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar – Dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta : EGC
- Purwanto. 2016. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti, 2012, Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya, Bandung: Refika Aditama.
- Septian Mawarnih Kahfih 2019. Jurnal pengaruh implementasi program keluarga harapan terhadap kesejahteraan Masyarakat oleh pendamping keluarga harapan (PKH) Di Desa Ciomas kecamatan panjalu kabupaten ciamis. Dinamika: Dinamika Jurnal ilmiah ilmu administrasi negara e-ISNN 2614-2945 V 6 no 3 Bulan september tahun 2019.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Achmad, Hery Buchori, dan Djaslim, Saladin 2013. Manajemen pemasaran Linda karya bandung.
- Terry,George.R 2016. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Purwanto. 2013.Evaluasi hasil belajar.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuningsih, Sumardani, dan Hani 2018. social protection In health and education through the hope family program: A case study in wanayasa vilage, wanayasa sub-district, purwakarta regency. Asia journal for property studies. ISSN 2477-0531